

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada hasil verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah, hasil forum Perangkat Daerah (UPTD-KPH), dan Renstra yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju dari kegiatan. Tujuan penyusunan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun ke depan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan di Maluku.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Ambon, April 2021

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU,



Ir. SADLI IE, M.Si., IPU.

Pembina Utama Madya

NIP. 196808281994031010

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	19
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... ..	26
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kehutanan.....	26
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan.....	27
 BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Realisasi Pencapaian Indikator Keluaran Kegiatan Tahun 2020	10
Tabel .2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari dana APBD Tahun 2020	13
Tabel .3 Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 yang bersumber dari dana APBD	13
Tabel .4 Pencapaian IKU, Sasaran Strategis Tahun 2020	19
Tabel .5 Pencapaian IKU, Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
Tabel .6 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel T -C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	31
Lampiran 2. Tabel T- C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	34
Lampiran 3. Tabel T- C 32 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	37
Lampiran 3. Tabel T- C 33 Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah Maluku dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana

Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu : Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan renja, perumusan rancangan akhir renja dan penetapanrenja SKPD.

Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah Renstra yang telah mengakomodir implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan kewenangannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk satu tahun mendatang yang berpedoman pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta indikator kinerja yang harus dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pernyataan, komitmen dan arahan Kepala Dinas terkait Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Revisi Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan maka kegiatan pembangunan kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 menghasilkan keluaran kegiatan seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1. Realiasi Capaian Indikator Keluaran Tahun 2020

Indikator Keluaran	Realisasi
Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
Penyediaan listrik dan telpon	12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan
Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	3 janis, 60.000 lembar
Penyediaan alat listrik dan penerangan gadung kantor	115 Jenis
Penyediaan makanan dan minuma rapat	12 bulan
Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 kali
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	16 orang, 12 bulan
Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12 bulan
Operasional UPTD KPH pada 11 Kab/Kota	12 bulan
Pengadaan peralatan kantor	AC 10 unit, dispencer 1 unit, Sound Ruangan 1 set, Aplikasi e-Office 1 aplikasi, PC 5 unit dan laptop 4 unit
Pengadaan Meubelair	1 set kursi tamu, Vertical Blind 39,15 M2, Gording 33,70 M2 dan ruang HPL konsultasi publik 1 paket
Terpeliharannya gedung kantor	Pemasangan pavin block, pembuatan kanopi tempat parkir dan pengecatan gedung kantor
Terpeliharannya kendaraan dinas operasional	7 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2
Jumlah ASN Kehutanan yang mengikuti Diklat	4 Orang diklat teknis dan 1 orang diklat non teknis
Terlaksananya sosialisasi penyiapan akses Perhutanan Sosial	8 Lokasi di 4 Kab : Kab. SBT (Air Nanang dan Kilbon), Kab. Buru (Siahoni dan Waitene), Kab. Bursel (Desa Leku dan Wamsisi) Kab. Kep. Aru (Desa Durjela dan Wangel)
Terlaksananya pengadaan peralatan Laboratorium Inokulan Gaharu Maluku	1 Paket
Terlaksananya kegiatan Inokulasi Gaharu	(Desa Kailolo kab. Malteng dan Desa Tanah Goyang Kab. SBB)
Terlaksananya kegiatan Budidaya Gaharu	2 ha di Desa Rohomoni Kab. Malteng dan 2 Ha di Desa Kawa Kab. SBB

Indikator Keluaran	Realisasi
Terlaksananya rekonsiliasi Penerimaan Iuran Kehutanan	4 Kali
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja IUPHHK-HA/HT	13 IUPHHK-HA/HT
Terlaksananya pemberian bantuan Alat ekonomi produktif bagi Kelompok Tani Hutan	6 kelompok Kab. SBT 3 kelompok (KTH Pemari Sungguh dan KTH Lesa Indah Desa Kilbon, KTH Air Nanang Kelor Desa Air Nanang), Kab. Malteng 3 kelompok (KTH Chrisela Desa Suli, KTH Air baru Desa Sila dan KTH Waiyahun Desa Kaitetu)
Terlaksananya pembinaan dan pengendalian IUPHHK	47 Unit IUPHHK
Terlaksananya inventarisasi Potensi HHBK	3 kabupaten, SBB (Desa Piru), Bursel (Desa Waikatin) dan Buru (Desa Lamahang)
Terlaksananya identifikasi keberadaan masyarakat hutan adat	6 kabupaten/kota : Ambon, SBB, Bursel, Maluku Tengah, SBT dan Buru
Terlaksananya Menev Penggunaan Kawasan Hutan	2 lokasi (Buru dan SBT)
Tersedianya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Sumur Resapan, Dam Penahan dan Gully Plug	30 unit pada 3 Kabupaten/Kota dengan rincian : Sumur Resapan 6 unit, Kota Ambon 2 unit (desa wayame dan hative besar), Maluku Tengah 3 unit (desa seith), Seram Bagian Barat 1 unit (desa Sukowati), Dam Penahan 12 unit (Kota Ambon 4 unit di Desa Wayame, Maluku Tengah 5 unit di desa Seith dan Seram Bagian Barat 3 unit di Desa Hunitetu), Gully Plug 12 unit (Kota Ambon 4 unit di Desa Wayame, Maluku Tengah 5 unit di Desa Seith dan Seram Bagian Barat 3 unit di Desa Hunitetu)
Tersedianya persemaian permanen	2 unit (Kota Ambon dan SBT)
Terlaksananya penanaman hutan rakyat	seluas 19 Ha di Desa Dullah Darat Kecamatan Dullah Utara Kota Tual
Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Reboisasi (T2)	40 Ha di Lamahang Kab. Buru
Terlaksananya pemeliharaan Hutan rakyat T1	seluas 42 Ha di Desa Suli Kab. Maluku Tengah (21 ha), Desa Salas Kec. Bula (11 ha) dan Desa Rukun Jaya Kec. Bula Barat (10 ha) Kab. Seram Bagian Timur
Terlaksananya pemeliharaan tanaman turus jalan T1	sepanjang 14,8 km ≈ Dusun Kotania Bawah – Atas Desa Piru Kab. Seram Bagian Barat (4 km), Desa Namlea – Lala Kab. Buru (4 km), Desa Labuang – Wainono Kab. Buru Selatan (4 km), Desa Poka – Tawiri Kota Ambon (2,8 km)
Terlaksananya pemeliharaan tanaman reboisasi T1	seluas 46 Ha di Desa Lamahang Kab. Buru
Terlaksananya penanaman lokasi DAS	seluas 20 Ha masing-masing di Negeri Soya 2 lokasi 18 Ha dan Negeri Hatalai 1 lokasi 2 Ha
Terlaksananya kampanye penyadaran publik terkait pelestarian DAS	5 lokasi di Wilayah DAS Kota Ambon yaitu Wae Tomu, Wae Batu Gajah, Wae Batu Gantung

Indikator Keluaran	Realisasi
Terlaksananya gerakan perempuan penyelamat air	2 lokasi di Kota Ambon (Kampus IAIN dan SMA Negeri 7 Hative) dengan jumlah anakan sebanyak 3500 anakan (3,18 Ha)
Terlaksananya pembinaan dan pengendalian RHL	6 Kab/Kota (Ambon, Malteng, SBB, Buru, Buru Selatan dan SBT)
Terlaksananya penanaman turus jalan	penanaman tanaman turus jalan sepanjang 15,16 km $\approx$ 1,516 Ha yang tersebar di Kab. Maluku Tengah (2.27 km), Kab. Seram Bagian Barat (3.41 km) Kab. Seram Bagian Timur (2.27 Km), Kab. Buru (3.18 km), Kab. Buru Selatan (2.73 km), Kota Ambon (1,3 km)
Tersedianya kebun bibit KPH	1 unit di Kabupaten SBB dan Terpeliharanya 4 unit kebun bibit KPH di Kab. Malteng, Buru dan Kota Tual dengan total jumlah bibit/anakan yang tersedia sebanyak 90.488 anakan
Terlaksananya forum kolaborasi dalam rangka pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	1 kali di Desa Wainibe, Wailana, Waikose dan Wamlana Kab. Buru, dengan jumlah peserta 15 orang
Tersedianya Sarpras Kebakaran Hutan dan Lahan	1 unit mobil tangki air, 8 unit motor trail, 50 unit pompa punggung, 50 pasang sarung tangan, 50 unit gepok pemukul api, 50 unit parang, 50 pasang sepatu boot anti api, 50 unit radio genggam, 1 unit selang/hose, 50 unit helm, 50 unit kaca mata dan 50 buah pakaian pelindung tahan api
Terlaksananya kampanye pengendalian Karhutla	4 kab/kota (Ambon, SBB, Malteng dan SBT)
Terlaksananya patroli pengamanan hutan	1 kali di 6 Kab/Kota (Ambon, Malteng, SBB, SBT, MTB, Aru)
Pertisipasi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Perubahan Iklim dengan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua	1 Kali
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahun 2021	4 Kali

Hasil Kegiatan tersebut di atas berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dalam Renstra Dinas Kehutanan untuk meningkatkan :

1. Produktifitas kehutanan.
 2. Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD-KPH.
 3. Kuantitas dan kualitas tutupan hutan.
 4. Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
- Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) realisasi sampai dengan Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Sasaran strategis tersebut diatas dicapai melalui 8 program dengan 46 kegiatan. Total Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2020 setelah perubahan adalah sebesar Rp **58.724.029.341,-**, dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 35.695.131.867
2. Belanja Langsung Rp 23.028.897.474

Anggaran Kegiatan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. **67.590.778.857,-** mengalami penurunan sebesar Rp.8.866.749.516,- atau 13,12 %. Menurunnya dana yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku disebabkan karena adanya refocusing belanja dalam rangka penanganan Dampak COVID-19. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	35.695.131.867	34.653.377.564	97,08	100	1.041.754.303
2	Belanja Langsung	23.028.897.474	20.181.399.450	87,64	100	2.847.498.024
	TOTAL	58.724.029.341	54.834.777.014	93,38	100	3.889.252.327

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Realisasi Program Kegiatan dana APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,270,420,500	2,358,121,457	100.00	912,299,043
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,700,000	1,800,000	100.00	8,900,000

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	159,000,000	73,364,657	100.00	85,635,343
3	Penyediaan alat tulis kantor	64,056,500	64,056,500	100.00	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,075,000	34,075,000	100.00	-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23,120,000	23,120,000	100.00	-
6	Penyediaan makanan dan minuman	40,010,000	32,831,200	100.00	7,178,800
7	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	372,300,000	250,251,500	100.00	122,048,500
8	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	479,624,000	465,985,440	100.00	13,638,560
9	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	12,820,000	12,816,600	100.00	3,400
10	Operasional UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	2,074,715,000	1,399,820,560	100.00	674,894,440
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,436,629,200	1,210,893,567	100.00	225,735,633
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	521,150,000	489,809,500	100.00	31,340,500
12	Pengadaan mebeleur	117,500,000	117,441,500	100.00	58,500
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	335,170,000	334,304,324	100.00	865,676
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	417,559,200	244,488,243	100.00	173,070,957
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45,250,000	24,850,000	100.00	20,400,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,400,000	13,495,600	100.00	16,904,400
16	Diklat Teknis dan Non Teknis	30,400,000	13,495,600	100.00	16,904,400
IV	Program Perhutanan Sosial	569,416,000	370,338,300	100.00	199,077,700
17	Sosialisasi dan koordinasi penyiapan pemberian akses perhutanan sosial	569,416,000	370,338,300	100.00	199,077,700
V	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	3,073,240,300	2,858,432,433	93.01	214,807,867
18	Pengembangan hasil hutan bukan kayu	906,510,000	845,327,050	100.00	61,182,950
19	Optimalisasi PNBK	289,200,000	268,286,583	100.00	20,913,417
20	Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan	451,832,000	434,614,300	100.00	17,217,700
21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)	684,439,000	595,948,000	100.00	88,491,000

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	
22	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan IUIPHHK	161,707,000	150,754,200	100.00	10,952,800
23	Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu	149,758,000	149,758,000	100.00	-
24	Identifikasi keberadaan masyarakat hutan adat (DBH)	189,745,300	189,245,300	100.00	500,000
25	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	240,049,000	224,499,000	100.00	15,550,000
VI	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	11,210,250,174	10,359,682,693	100.00	850,567,481
26	Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS	1,075,234,400	1,020,398,000	100.00	54,836,400
27	Pembangunan/Pengelolaan Persemaian Permanen	2,269,190,000	2,096,241,000	100.00	172,949,000
28	Rehabilitasi lahan (pembangunan hutan rakyat) DBH	223,385,900	213,467,670	100.00	9,918,230
29	Pemeliharaan tanaman reboisasi tahun 2 (DBH)	205,161,000	199,533,950	100.00	5,627,050
30	Pemeliharaan hutan rakyat (T1) (DBH)	374,354,900	263,039,492	100.00	111,315,408
31	Pemeliharaan penanaman turus jalan (T 1) (DBH)	347,103,514	341,915,942	100.00	5,187,572
32	Pemeliharaan tanaman reboisasi tahun 1 (DBH)	233,723,250	228,108,335	100.00	5,614,915
33	Penguatan lereng dengan metode Bioengineering (FMSRB)	300,000,000	299,613,125	100.00	386,875
34	Kampanye penyadaran publik pelestarian DAS (FMSRB)	204,120,000	185,533,000	100.00	18,587,000
35	Penghijauan lingkungan (gerakan perempuan penyelamat air) DBH	887,513,800	775,193,404	100.00	112,320,396
36	Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RHL dan dana DBH	169,137,000	134,087,419	100.00	35,049,581
37	Penanaman turus jalan	3,052,763,800	2,825,181,500	100.00	227,582,300
38	Pembuatan kebun bibit KPH	1,842,239,650	1,751,046,896	100.00	91,192,754
39	Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS (Hutang Tahun Anggaran 2019)	26,322,960	26,322,960	100.00	-
VII	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	2,995,419,300	2,659,457,300	100.00	335,962,000
40	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Penting (Kawasan Ekosistem Esensial)	141,355,000	103,192,900	100.00	38,162,100

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	
41	Pengembangan sarana prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH)	2,109,088,300	2,031,903,000	100.00	77,185,300
42	Gerakan pencegahan karhut (DBH)	347,160,000	209,812,500	100.00	137,347,500
43	Patroli pengamanan hutan	376,756,000	308,620,200	100.00	68,135,800
44	Sosialisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (DBH)	21,060,000	5,928,700	100.00	15,131,300
VIII	Program perencanaan dan pengembangan hutan	443,122,000	350,978,100	100	92,143,900
45	Perencanaan dan Evaluasi Program Tahunan	409,382,000	333,103,800	100.00	76,278,200
46	Forum penyusunan OPD	33,740,000	17,874,300	100.00	15,865,700
	TOTAL BL	23,028,897,474	20,181,399,450	100.00	2,847,498,024
	Total BTL	35,695,131,867	34,653,377,564	100.00	1,041,754,303
	Grand Total	58,724,029,341	54,834,777,014	100.00	3,889,252,327

Realisasi fisik kegiatan tahun 2020 sebesar 100 %, sementara sisa anggaran merupakan sisa biaya tender dan biaya perjalanan dinas.

B. Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tidak mendapatkan alokasi Dana APBN.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 merupakan tahun ke-2 (kedua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2019-2024 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan, memfasilitasi klaim hak ulayat masyarakat adat dan areal pemegang izin guna meminimalisir konflik tenurial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan, mengoptimalkan tata kelola layanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta melakukan upaya menurunkan gas rumah kaca dalam rangka komitmen pelaksanaan kebijakan perubahan iklim.

Pembangunan kehutanan Tahun 2020 diprioritaskan pada upaya mengoptimalkan aneka fungsi pemanfaatan hutan, optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas tersebut dalam rangka mewujudkan Misi ke-3 Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan”** sebagaimana telah dijabarkan dalam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Maluku yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kehutanan Tahun 2019-2024.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2020 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bersumber Anggaran dari APBD digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku periode 2019-2024, yaitu :

- 1) **Meningkatnya Produktifitas Hutan.** Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :
 - a. Penertiban perijinan pemanfaatan hasil hutan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan produksi hasil hutan (Kayu/bukan kayu dan jasa lingkungan)

- b. Meningkatnya Ekonomi Hutan melalui peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dengan indikator kinerja adalah jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan).
- c. Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak melalui UPTD KPH.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kehutanan dengan indikator kinerja adalah terpenuhinya kompetensi aparatur pada Dinas Kehutanan dan UPTD KPH.
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan KPH melalui pembangunan kantor UPTD KPH di tingkat tapak dengan indikator adalah jumlah bangunan KPH yang terbangun.

2) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan,

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan lingkungan dan pembuatan bangunan konservasi tanah dengan indikator kinerja adalah persentase lahan kritis yang ditanami.
- b. Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan dan sumber daya hutan akibat gangguan alam, ternak dan manusia, pencegahan kebakaran hutan dan praktek-praktek perambahan hutan dan pembalakan liar, peningkatan biomassa hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan.
- c. Pemantapan kawasan hutan melalui monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan baik yang prosedural maupun yang non prosedural dengan indikator pengelolaan kawasan sesuai regulasi.

3) *Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial*, Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Terbangunnya 73 unit Perhutanan Sosial (HKm, HTR, HD, HA dan pola kemitraan) secara mandiri melalui fasilitasi dan pendampingan oleh penyuluh.
- b. Pengelolaan areal PS dengan sistem agroforestry dan pemberian izin Pemanfaatan potensi yang terkandung di dalam areal perhutanan sosial seluas 102.482 Ha (73 Unit).

Capaian terhadap 3 sasaran kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Tabel Pencapaian IKU Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatkan	Produksi Kayu	M3/Thn	304.000	218.273,32	71,80
	kehutanan	Produksi HHBK	Ton/Thn	800	205.005,9	25.625
2	Meningkatkan ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis kepulauan	Rehabilitasi lahan kritis	%	0,33	0,31	93,43
		Kualitas Penutupan Lahan	%	67	65	97
3	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan areal perhutanan social	Unit	13	6	46,15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kehutanan sebesar Rp. **93.023.376.967,-** dan setelah dirasionalisasi / refocusing berkurang menjadi Rp. **58.724.029.341,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tiga sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Sasaran tersebut adalah :

1. Produktifitas kehutanan.
2. Kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan.

3. Pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut di atas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 5. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatkan	Produksi Kayu	M3/Thn	304.000	218.273,32	71,80
	kehutanan	Produksi HHBK	Ton/Thn	800	205.005,9	25.625
2	Meningkatkan ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis kepulauan	Rehabilitasi lahan kritis	%	0,33	0,31	93,43
		Kualitas Penutupan Lahan	%	67	65	97
3	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan areal perhutanan social	Unit	13	6	46,15

Dari Tabel diatas dapat dilihat hasil pengukuran kinerja menunjukan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2020 termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Hasil pencapaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel T-C.29 terlampir.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya pada beberapa periode yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Luas lahan kritis
2. Klaim kepemilikan hak ulayat dalam kawasan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan non prosedural
4. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat/ skema Perhutanan Sosial

Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh corporate menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial.

5. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengawasan sumber daya hutan
6. Belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan

7. Memaksimalkan Kesatuan Pengelolaan Hutan
8. Terbatasnya sumber daya manusia

Berdasarkan uraian diatas, dalam penentuan isu-isu strategis pada Dinas Kehutanan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan memperhatikan Visi Pemerintah Daerah yaitu **“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”**.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Permasalahan yang dihadapi saat ini dan merupakan kondisi pembangunan kehutanan di Maluku antara lain :

1. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik
2. penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi.
3. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat.
4. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
5. Belum tersedianya data kondisi dan potensi kawasan hutan (baik kayu dan non kayu) sebagai dasar penyusunan rencana makrokehutanan.
6. Kondisi kekritisan DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Maluku.

7. Belum optimalnya promosi, investasi serta inkonsistensi regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan kebijakan sistem pemerintahan daerah.
8. Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan.
9. Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan daya beli masyarakat sekitar hutan.
10. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan.
11. Peran Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan belum optimal Persepsi, motivasi dan partisipasi kesadaran lingkungan pemangku kepentingan masih rendah.
12. Belum terciptanya sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
13. Masih terjadinya pencurian hasil hutan, pembalakan liar dan gangguan keamanan hutan lainnya.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konflik tenurial.
2. Penduduk miskin di dalam dan sekitar hutan.
3. Tingginya kebutuhan lahan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan.
5. Tingginya degradasi dan deforestasi.
6. Belum mantapnya kawasan hutan.
7. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan hutan.
2. Tersedianya anggaran pembangunan.
3. Kawasan hutan yang luas.
4. Peraturan perundangan bidang kehutanan.
5. Tingginya permintaan hasil hutan.
6. Minat investasi di bidang kehutanan.
7. Potensi Sumber Daya Hutan cukup besar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengacu pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD, dari jumlah program dan kegiatan telah sesuai dengan hasil analisis dan kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku guna melaksanakan pembangunan kehutanan di Tahun 2022. Ini terbukti dengan telah dialokasikan anggaran operasional bagi UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang mempunyai wilayah kerja di 11 Kabupaten/Kota. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2022 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh UPTD-KPH, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah memiliki keragaman. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di masing-masing UPTD-KPH, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagai bahan yang akan

dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Maluku pada Tahun 2022. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dapat dilihat pada table T-C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan termasuk dalam Bidang prioritas kebijakan Nasional yang ke 9 (sembilan) yaitu : **“Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana “** dimana lebih dikhususkan pada masalah Lingkungan Hidup (hutan dan pelestarian hutan). Untuk itu semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku diarahkan untuk tetap menjaga dan mempertahankan fungsi hutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Maluku yang terintegrasi, efisien, efektif dan komprehensif untuk kurun waktu 1 Tahun.

Berdasarkan tujuan selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menjabarkannya dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU tahun 2022 telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 2019-2024 serta RPJMD Maluku 2019-2024.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2019-2024 adalah pada tabel 6. berikut:

Tabel 6. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2022
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan	Meningkatnya	Produksi Kayu	m ³ /Thn	308.000
			Ton/Thn	820
Meningkatkan keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan sebaran yang proporsional	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan perbasah kepulauan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	0,34
		Kualitas Penutupan Lahan	%	69%
	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan sosial	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	Unit	15

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022, maka rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan rancangan awal RKPD Provinsi Maluku, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 837.758.900.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 230.000.000
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp. 17.419.081.150
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp. 2.276.520.450

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp. 1.142.589.950

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp.999.187.750

2. Program Pengelolaan Hutan, dengan 4 kegiatan :

a. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Rp.5.411.659.800,-

b. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Rp. 34.990.242.700

c. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Rp.3.327.604.600

d. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun Rp. 448.232.050

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dengan kegiatan : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Rp. 1.752.571.250

4. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan dengan kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Rp. 3.838.718.400

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp. 2.932.661.000

A. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Rencana Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 tersebar di semua Kab / Kota.

B. Jumlah Pagu Indikatif

Rencana Kebutuhan Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 74.067.661.000,- dengan rincian :

No.	Sumber Dana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	APBD	5	13	74.606.828.000
TOTAL		5	13	74.606.828.000

(Tabel T-C.33 terlampir).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini telah disusun melalui proses koordinasi dan sinkronisasi. Program dan kegiatan Renja ini juga telah dilakukan penyelarasan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan UPTD KPH, namun keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renja ini sangat tergantung dari alokasi anggaran yang cukup serta kinerja aparatur kehutanan yang tinggi. Untuk itu diharapkan adanya komitmen bersama dari para pihak agar pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku dapat terselenggara dengan baik sehingga Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan* dapat tercapai.

LAMPIRAN

RENJA TAHUN 2022

TABEL 1.10.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Darah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Maluku

Dinas Kehutanan

lembar 1

Usuran /Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan										Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)				Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
Kode	Tahun 2019			Kode	Tahun 2020			Kode	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2			3	4			5	6			7			3	8		9	10		4	5	8=(7/6)	9	10=(5+8)	11=(10/4)				
	Usuran : Pilihan																													
	Bidang Kehutanan																													
	Program Pemakan - Pemakan Perundang-Undangan																													
	Penyusunan Peraturan Gubernur																													
2	02	2	02	01	01																12	Bulan	110	Bulan	974	110	9,17			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi		Terperuhnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terperuhnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran				12	Bulan	110	Bulan	974	110	9,17				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12	bua	3.500	bua	3500	3.500					
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	Dok	12	bua	12	100	13				
	Penyediaan Perlakuan Kebersihan Kantor				Penyediaan Perlakuan Kebersihan Kantor				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12	bulan	12	bulan	27	20	74				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Penyediaan Alat Tulis Kantor				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				11	Kab/Kota	12	bulan	12	100	23				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12	bulan	12	bulan	12	100	12				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12	bulan	3	bulan	7	100	7				
	Penyediaan Makanan dan Minuman				Penyediaan Makanan dan Minuman				Penyediaan Perlatan Rumah Tangga			Penyediaan Perlatan Rumah Tangga		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga				12	bulan	3	bulan	24	17	100				
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12	bulan	9	bulan	12	100	12				
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi perkantoran				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi perkantoran				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12	Bulan	3	Bulan	12	100	12				
	Operasional UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku				Operasional UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1	Dok	11	UPTD	11	100	11				
2	02	2	02	01	02																12	Bulan	151	Bulan	57	12	600	24	175	14,58
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				12	Bulan	151	Bulan	57	12	600	24	175	14,58	
	Pengadaan Kebutuhan Dinas				Pengadaan Kebutuhan Dinas				Pengadaan Kebutuhan Dinas			Pengadaan Kebutuhan Dinas		Pengadaan Kebutuhan Dinas		Pengadaan Kebutuhan Dinas				12	Bulan	-	unit	3	12	100	12	1,00		
	pengadaan Peralatan Gedung kantor				pengadaan Peralatan Gedung kantor				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				12	Bulan	-	unit	17	17	100	30	#DIV/0!		
	pengadaan mobil				pengadaan mobil				Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan			Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan				2	unit	-	unit	1	1	100	-	-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional				1	Paket	-	unit	12	12	100	17	17,00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebutuhan Dinas/Operasional				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1	Paket	27	unit	12	100	27	27,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				3	unit	46	unit	1	100	46	15,33			
	Rehabilitasi gedung/bangunan gedung kantor				Rehabilitasi gedung/bangunan gedung kantor				Penyediaan jasa Surat Menyurat			Penyediaan jasa Surat Menyurat		Penyediaan jasa Surat Menyurat		Penyediaan jasa Surat Menyurat				12	Bulan	1	unit	-	0,5	3500	3,501	291,75		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12	Bulan	-	8	1	100	11	0			
	Pembinaan Pegawai Lapangan				Pembinaan Pegawai Lapangan				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				23	org	60	org		12	72	3,13			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan				Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				-	org	16	16	100	-	-				
	Pembinaan Teknis Pemetaan GIS				Pembinaan Teknis Pemetaan GIS				Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pakaj Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan			Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pakaj Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pakaj Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pakaj Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan				12	Bulan	60	org	0	60	60				
2	02	2	02	01	06																12	Bulan	30	Org	0	30	30			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai				Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1	Unit									

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan										Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)				Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Rencana Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Persentase Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
Kode	Tahun 2019		Kode	Tahun 2020		Kode	Tahun 2021		Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4/5)	11=(10/6)
1	2		3		4		5		4	5	3			4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4/5)	11=(10/6)
2 02 2 02 01 15 17	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan IUPHHK								Kegiatan Pelaksanaan Perлиндungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Kegiatan Pelaksanaan Perлиндungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Tetapaknya Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengelolaan IUPHHK			0 unit	47 unit			20		47	
2 02 2 02 01 15 18	Identifikasi keberadaan Masyarakat Hutan Asli								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perлиндungan Hutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perлиндungan Hutan	Tetapaknya Kegiatan identifikasi Keberadaan Masyarakat Hutan Asli	Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan	Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan	0 lokasi	4 lokasi			4		4	
2 02 2 02 01 15 19	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Non-Produsional								Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemecahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemecahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tetapaknya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Non-produsional	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemecahan /Pengulangan kebakaran Hutan dan Lahan	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemecahan /Pengulangan kebakaran Hutan dan Lahan	0 Kab/Kota	11 Lokasi Kab/Kota			6		11	
									Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											
									fasilitasi Pemenuhan Komitmen tan Uraha Industri Primer hasil Hutan kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem	fasilitasi Pemenuhan Komitmen tan Uraha Industri Primer hasil Hutan kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem											
2 02 2 02 01 16 05	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS	Kegiatan Operasional Pemeliharaan dan Pengelolaan Sisi Atas Kegiatan Penanaman	Terbangunnya bangunan konservasi tanah pada DAS untuk meningkatnya aliran DAS	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 Paket	1.000 Paket	11	9			1.000	
	Penanaman Mangrove Teluk Anbon dan Penanaman di Sekitar Danau Was Eia								Pembangunan/Pengelolaan Penanaman Perikanan	Tetapaknya Penanaman Mangrove di Teluk Anbon dan Penanaman di Lokasi Sekitar Danau Was Eia	Terbangunnya Penanaman untuk penyediaan bibit			0 ha	- ha	2	2			-	
	Penanaman Hutan dan Lahan								Rehabilitasi Lahan (Pembangunan Hutan Rakyat)	Tetapaknya Kegiatan Penanaman Hutan Lahan	Berkurangnya Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan			0 ha	- ha	50	50			-	
2 02 2 02 01 16 9	Kegiatan Rehabilitasi lahan kritis pada wilayah KPH dan Kota								Rehabilitasi Mangrove (DAS)	Kegiatan Rehabilitasi lahan kritis pada wilayah KPH Walirua Daerah Bura dan Kota Anbon	Berkurangnya Lahan Kritis pada Kawasan Mangrove	Pedampingan Kelompok Tani Hutan	Pedampingan Kelompok Tani Hutan	0 ha	25 ha	40	0			25	
2 02 2 02 01 16 10	Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS								Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 2 (DBH)	Tetapaknya peningkatan daya dukung dan daya tampung DAS	Terpeliharanya Tanaman Reboisasi T2	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	0 unit	30 unit	40	40	10		30	
2 02 2 02 01 16 11	Rehabilitasi Lahan (Pembangunan Perikanan Reboisasi)								Pemeliharaan Hutan Rakyat (T1)	Tetapaknya kegiatan rehabilitasi hutan (pengelolaan tanaman reboisasi)	Terpeliharanya Tanaman Hutan Rakyat			0 unit	-	182	126			-	
2 02 2 02 01 16 12	Perikanan								Pemeliharaan penanaman Turus Jalan (T1)	Tetapaknya pembangunan dan pengelolaan penanaman perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan			0 unit	1 unit	27,7	27			1	
2 02 2 02 01 16 13	Penyusunan data dan Informasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 1	Tetapaknya Penyusunan data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi	Terpeliharanya Tanaman Reboisasi T1	identifikasi daerah rawan longsor	identifikasi daerah rawan longsor	0 Kab/Kota	- Kab/Kota	100	95			-	
2 02 2 02 01 16 14	Rehabilitasi Lahan (Pembangunan Hutan Rakyat)								Penguatan Lering dengan metode Bioengineering (FMSRB)	Tetapaknya Kegiatan Rehabilitasi lahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lering dengan Metode Bioengineering (FMSRB)	bangunan Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	bangunan Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	0 Ha	30 Ha	1	1	20,00		30	
2 02 2 02 01 16 15	Rehabilitasi Mangrove								Kampanye penyediaan Publik Pelestaran DAS (FMSRB)	Tetapaknya Kegiatan Rehabilitasi Mangrove	Terlaksananya Kegiatan kampanye Pemadanan Publik Pelestaran DAS (FMSRB)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	0	10	1	1			10	
2 02 2 02 01 16 16	Pembuatan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)								Penghijauan Lingkungan (Serakan Pemukiman Penyusutan Air)	Tetapaknya Kegiatan Pembibitan	Terlaksananya Penghijauan lingkungan (Serakan Pemukiman Penyusutan Air)			0 Kab/Kota	8 Kab/Kota	1	1	3,00		8	
2 02 2 02 01 16 17	Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Penggajian T-1								Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RHL dan Dana DBH	Tetapaknya Kegiatan pemeliharaan Tanaman Reboisasi Penggajian T-1	Terlaksananya Kegiatan RHL di Kabupaten/Kota			0 Kab/Kota	40 Kab/Kota	11	11			40	
2 02 2 02 01 16 18	Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat								Penanaman Turus Jalan	Tetapaknya Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Penanaman turus jalan			0 Kab/Kota	550 Kab/Kota	11	11	200		550	
2 02 2 02 01 16 19	Penanaman Turus Jalan								Pembuatan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Tetapaknya Kegiatan Penanaman turus Jalan	Tersedianya Bibit pada KPH			0 Kab/Kota	12 Kab/Kota	7	7	3		12	
2 02 2 02 01 16 20	Reboisasi Penggajian								Penanaman Hutan Rakyat (PO)	Tetapaknya Kegiatan Reboisasi	Terlaksananya Penanaman Hutan Rakyat			0 Kab/Kota	11 Kab/Kota	0	0	4,00		11	
2 02 2 02 01 16 21	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RHL dan Dana DBH								Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung DAS (Hutanga)	Tetapaknya Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Terbangunnya bangunan konservasi tanah pada DAS untuk meningkatnya aliran DAS			0 Kab/Kota	11 Kab/Kota	0	0			11	
2 02 2 02 01 16 22	Kampanye pengedaran Publik Pelestaran DAS (FMSRB)								Penanaman Turus Jalan (Lanjutan)	Tetapaknya Kegiatan kampanye Pengedaran Publik Pelestaran DAS (FMSRB)	Terlaksananya Kegiatan Penanaman turus jalan			0 Kab/Kota	3 Kab/Kota	0	1			3	
2 02 2 02 01 16 23	Identifikasi Lahan Prima, Lahan Rusak, dan lahan Kritis (FMSRB)									Tetapaknya Kegiatan Identifikasi Lahan Prima, Rusak dan lahan Kritis				0 Kab/Kota	12 Kab/Kota	1				12	
2 02 2 02 01 16 24	Pembuatan Tanaman RHL									Tetapaknya Kegiatan pembuatan Tanaman RHL				0 Kab/Kota	10 Kab/Kota					10	
2 02 2 02 01 16 25	Identifikasi Kawasan Tanah Longsor (Identification of Landside Vulnerability)									Tetapaknya Kegiatan Identifikasi Kawasan Tanah Longsor				0 Kab/Kota	- Kab/Kota		29			-	
	Program Perлиндungan dan Konservasi SDH								Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Tetapaknya Kegiatan Perлиндungan dan Konservasi SDH	Persentase Peningkatan Kualitas Hutan Melalui Tutupan Lahan		-	-	122	-	29	3	2	122
2 02 2 02 01 17 02	Sosialisa Dampak Kerusakan Hutan								Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Penting (Kawasan Ekosistem Esensial)	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestaran Alam	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Dampak Kerusakan Hutan	Terlaksananya Identifikasi dan inventarisasi KEE		0 Desa	107 Desa	3	5			107	
2 02 2 02 01 17 06	Operasi Pengamanan Hutan dan Pengelolaan Kesus Tindak Pidana di Bidang Kehutanan								Pengembangan sarana dan prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Tindak Pidana Kehutanan serta Operasi Pengamanan Hutan	Terbentuknya pengembangan sarana dan prasarana pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		0 lokasi	8 lokasi	5	11			8	
	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan								Gerakan Penghijauan Kebakaran Hutan (Penghijauan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan)	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Tetapaknya Kegiatan Penghijauan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			0 lokasi	- lokasi	11	9			-	
	Sosialisa peraturan Daerah								Patroli Pengamanan Hutan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Tetapaknya Sosialisasi Peraturan Daerah Bag Aparatur Pemerintahan, LSI, Stakeholder, dan Masyarakat	Terlaksananya Pengamanan Hutan		0 lokasi	- lokasi	9	1			-	
2 02 2 02 01 17 10	Penyelesaian Kasus Hutan Bidang Kehutanan								Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penguatan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan	Tetapaknya Kegiatan Tindak/Pidana Kehutanan serta Operasi Pengamanan Hutan	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim		0 kasus	2 kasus	1	0	1		2	
2 02 2 02 01 17 12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Penting (Kawasan Ekosistem Esensial)								Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Tetapaknya Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial			0 lokasi	5 lokasi	0	0	1		5	
2 02 2 02 01 17 13	Pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan								Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Kegiatan pengamanan Hutan				0 Lokasi	- Lokasi	0	0			-	
2 02 2 02 01 17 14	Peningkatan Kapasitas Salings Pencegahan Kebakaran Hutan								Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas salings kebakaran hutan			0 Lokasi	6 Lokasi	0	0	2		6	

Usuran /Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan													Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)				Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan									
Kode	Tahun 2019					Kode	Tahun 2020					Kode	Tahun 2021					Tahun 2022		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4					5	6					7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	02	2	02	01	17	15										Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Relaksasi Kegiatan korserasi					4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)		
2	02	2	02	01	17	15										Konservasi Sumber Dage Genetik		0	Lokasi	2	Lokas	0		0					2			
2	02	2	02	01	17	16										Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pelaksanaan Kegiatan penganaman Hutan					0	kali	132	kali	0	0	66		132	
2	02	2	02	01	17	17										Sosialisasi Mitgasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Mitgasi dan adaptasi Perubahan Iklim					0	kali	2	kali	0	3			2	
																Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terlaksannya Perencanaan dan Pengembangan Hutan					-	-	7	-	3	1	2	4,2		
																Forum SKPD Provinsi Maluku	Perencanaan dan Evaluasi Program Tahunan	Terlaksannya Forum Penyusunan SKPD Kehutanan Provinsi Maluku Serta Kegiatan Lainnya	Paket	2	Paket	1	1					2				
2	02	2	02	01	20	03										Perencanaan dan Evaluasi Program Tahunan	Penyusunan dokumen rencana kehutanan Tingkat Provinsi (RKTfP)	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Program Tahunan	Terlaksananya Penyusunan Rencanan Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTfP) Maluku Tahun 2015	Kab/Kota	16	Kab/Kota	1	1			16					
-						04										Penyusunan DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) Pembangunan Kebun Binatang	Forum SKPD Provinsi Maluku	Terlaksananya (DED) Pembangunan Kebun Binatang	Terlaksananya Forum Penyusunan SKPD Kehutanan Provinsi Maluku Serta Kegiatan Lainnya	Dok	-	Dok	1					0				
																Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTfP)	Kegiatan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTfP) Maluku Tahun 2011-2019					0	dok	1	dok				1			
2	02	2	02	01	20	5										Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH melalui Pembangunan Resort KPH	Kegiatan Pemantauan Resort KPH					3	unit	2	unit			2		8,87		


 Ambon, April 2021
 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,
H. SAMALITIE, M.P.Si
 Kepala Utama Madya
 NIP. 19650828 199403 1 010

TABEL T- C.31
REVIEW TERHADAP RKDP TAHUN 2022
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH						HASIL ANALISIS					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28	URUSAN PILIHAN						URUSAN PILIHAN					
3.28	KEHUTANAN						KEHUTANAN					
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00 Persen	22,905,138,200.00		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00 Persen	22,905,138,200.00	
3.28.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				837,758,900.00		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				837,758,900.00	
3.28.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Ambon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/Anggaran	1.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Ambon	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/Anggaran	1.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambon	Terlaksananya Monev dan Penilaian Kinerja ASN UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov.	1.00 tahun	230,000,000.00	APBD-DAU	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Ambon	Terlaksananya Monev dan Penilaian Kinerja ASN UPTD KPH Dinas	1.00 tahun	230,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03	Administrasi Umum				17,419,081,150.00		Administrasi Umum				17,419,081,150.00	
3.28.01.1.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Ambon	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.00 Tahun	102,647,850.00	APBD-DAU	Penyediaan alat tulis kantor	Ambon	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.00 Tahun	102,647,850.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ambon	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.00 tahun	53,795,850.00	APBD-DAU	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ambon	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.00 tahun	53,795,850.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ambon	Tersedianya Bahan-bahan Listrik	1.00 Tahun	78,517,400.00	APBD-DAU	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Ambon	Tersedianya Bahan-bahan Listrik	1.00 Tahun	78,517,400.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ambon	Tersedianya Bahan dan Peralatan	1.00 Tahun	21,805,150.00	APBD-DAU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ambon	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan	1.00 Tahun	21,805,150.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Ambon	Tersedianya Makanan dan Minuman	1.00 tahun	86,262,650.00	APBD-DAU	Penyediaan makanan dan minuman	Ambon	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1.00 tahun	86,262,650.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon	Pimpinan mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.00 tahun	576,052,250.00	APBD-DAU	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ambon	Pimpinan mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	1.00 tahun	576,052,250.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.18	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	Terlaksananya operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	1.00 tahun	16,500,000,000.00	APBD-DAU-DBH	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	Terlaksananya operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan	1.00 tahun	16,500,000,000.00	APBD-DBH
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,276,520,450.00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,276,520,450.00	
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Mobil	Ambon	Tersedianya Kendaraan Dinas	4 Unit	1,380,000,000.00	APBD-DAU	Pengadaan Mobil	Ambon	Tersedianya Kendaraan Dinas	4 Unit	1,380,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.07.05	Pengadaan mebeleur	Ambon	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 Paket	205,131,250.00	APBD-DAU	Pengadaan mebeleur	Ambon	Tersedianya Mebeleur Kantor	1 Paket	205,131,250.00	APBD-DAU
3.28.01.1.07.06	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ambon	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	691,389,200.00	APBD-DAU	Pengadaan peralatan gedung kantor	Ambon	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	691,389,200.00	APBD-DAU
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				999,187,750.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				999,187,750.00	
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.00 tahun	19,245,250.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.00 tahun	19,245,250.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Ambon	Tersedianya Jasa Komunikasi	1.00 tahun	229,942,500.00	APBD-DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Tersedianya Jasa Komunikasi	1.00 tahun	229,942,500.00	APBD-DAU
3.28.01.1.03.07	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Ambon	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1.00 Tahun	750,000,000.00	APBD-DAU	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Ambon	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1.00 Tahun	750,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,142,589,950.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				1,142,589,950.00	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ambon	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	450,000,000.00	APBD-DAU	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ambon	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	450,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ambon	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	600,000,000.00	APBD-DAU	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Ambon	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	600,000,000.00	APBD-DAU
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Ambon	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	92,589,950.00	APBD-DAU	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Ambon	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	92,589,950.00	APBD-DAU
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00 Persen	43,177,739,150.00		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00 Persen	43,177,739,150.00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Tertib Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan		5,411,659,800.00		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Tertib Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan		5,411,659,800.00	
3.28.03.1.03.04	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kab/Kota	Data dan informasi keberadaan masyarakat adat	33 Lokasi	540,589,700.00	APBD-DAU	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kab/Kota	Data dan informasi keberadaan masyarakat adat	33 Lokasi	540,589,700.00	APBD-DAU

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH						HASIL ANALISIS					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	Terbina dan terkendalanya operasional IUPHHK dan	13 Unit IUPHHK 11	2,052,304,950.00	APBD-DAU	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	Terbina dan terkendalanya operasional IUPHHK dan	13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	2,052,304,950.00	APBD-DAU
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	11 Kab/kota	Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Operasional Lab. Inokulan Gaharu	18.00 Lokasi	2,818,765,150.00	APBD-DAU	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	11 Kab/kota	Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Operasional Lab. Inokulan Gaharu	18.00 Lokasi	2,818,765,150.00	APBD-DAU
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan		Berkurangnya luas lahan kritis (Ha)		34,990,242,700.00		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan		Berkurangnya luas lahan kritis (Ha)		34,990,242,700.00	
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	11 Kab/Kota	Tersedianya Dokumen RTnRL Provinsi Maluku	11 Lokasi	1,543,300,000.00	APBD-DBH	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	11 Kab/Kota	Tersedianya Dokumen RTnRL Provinsi Maluku	11 Lokasi	1,543,300,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.02	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	3 Kab (Malteng, Buru dan Malra)	Luas hutan rakyat yang dibangun	79 Ha	2,916,975,000.00	APBD-DBH	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	3 Kab (Malteng, Buru dan	Luas hutan rakyat yang dibangun	79 Ha	2,916,975,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	11 Kab/Kota	Luas Areal Penghijauan / Reboisasi yang dibangun dan kegiatan "MURAD"	171 Ha	18,347,507,100.00	APBD-DBH	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	11 Kab/Kota	Luas Areal Penghijauan / Reboisasi yang dibangun dan kegiatan "MURAD"	171 Ha	18,347,507,100.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Terkelolanya persemaian permanen dan kebun bibit	11 Unit	5,462,500,000.00	APBD-DBH	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Terkelolanya persemaian permanen dan kebun bibit	11 Unit	5,462,500,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Brigade Dalkarhut dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	11 Lokasi	5,862,705,750.00	APBD-DBH	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	11 Kab/Kota	Jumlah Brigade Dalkarhut dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	11 Lokasi	5,862,705,750.00	APBD-DBH
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Terkendalnya rehabilitasi lahan kritis	11 Lokasi	857,254,850.00	APBD-DBH	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Kab/Kota	Terkendalnya rehabilitasi lahan kritis	11 Lokasi	857,254,850.00	APBD-DBH
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Berkurangnya tingkat kerusakan hutan		2,327,604,600.00		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan		kerusakan hutan		2,327,604,600.00	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	11 Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Publik Akan Dampak Kerusakan Hutan	11 Lokasi	287,500,000.00	APBD-DBH	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	11 Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Publik Akan Dampak Kerusakan Hutan	11 Lokasi	287,500,000.00	APBD-DBH
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Ambon	Terselesakannya pengaudan dan penyelesaian dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan secara litigasi dan non litigasi	3 kegiatan	2,040,104,600.00	APBD-DBH	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Ambon	Terselesakannya dan penyelesaian dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan secara litigasi dan non litigasi	3 kegiatan	2,040,104,600.00	APBD-DBH
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				448,232,050.00		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu				448,232,050.00	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	11 Kab/kota	Tertib Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Unit manajemen)	86.00 Unit	448,232,050.00	APBD-DAU	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	11 Kab/kota	Tertib Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Unit manajemen)	86.00 Unit	448,232,050.00	APBD-DAU
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00	1,752,571,250.00		PROGRAM KONSERVASI SUMBER	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00 Persen	1,752,571,250.00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk		1,752,571,250.00		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan		Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk		1,752,571,250.00	
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Teridentifikasinya Kawasan Ekosistem Penting (KEE)	8 Lokasi	1,752,571,250.00	APBD-DBH	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Teridentifikasinya Kawasan Ekosistem Penting (KEE)	8 Lokasi	1,752,571,250.00	APBD-DBH
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	14.00 unit	Pemanfaatan Areal Perhutanan	14.00 unit	3,838,718,400.00		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	14.00 unit	Perhutanan Sosial	14.00 unit	3,838,718,400.00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				3,838,718,400.00		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				3,838,718,400.00	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	11 Kab/Kota	Peningkatan Kelas KTH dan Pemberian Bantuan Peralatan Ekonomi	14 Kelompok	2,159,566,600.00	APBD-DBH	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	11 Kab/Kota	Peningkatan Kelas KTH dan Pemberian Bantuan Peralatan Ekonomi	14 Kelompok	2,159,566,600.00	APBD-DBH
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11 Kab/Kota	Jumlah Kelompok PS yang terfasilitasi	14 Kelompok	1,679,151,800.00	APBD-DBH	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11 Kab/Kota	Jumlah Kelompok PS yang terfasilitasi	14 Kelompok	1,679,151,800.00	APBD-DBH
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00	2,932,661,000.00		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH	68.00 Persen	Peningkatan Kualitas	68.00 Persen	2,932,661,000.00	

Kode	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2,932,661,000.00		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2,932,661,000.00	
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi Dan Daya Dukung Wilayah DAS	11 Kab/kota	Tersedianya Bangunan Konservasi Tanah dan Air	11.00 Unit	2,932,661,000.00	APBD-DBH	Optimalisasi Fungsi Dan Daya Dukung Wilayah DAS	11 Kab/kota	Tersedianya Bangunan Konservasi Tanah dan Air	11.00 Unit	2,932,661,000.00	APBD-DBH
Grand Total					74,606,828,000.0						74,606,828,000.0	

DAU 6,905,138,200.00
DBH-DR 67,701,689,800.00

Ambon, April 2021
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,



NIP. 19680828 199403 1 010

TABEL T- C.33
USULAN PROGRAM DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi (UPTD KPH)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.28	URUSAN PILIHAN				
3.28	KEHUTANAN				
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100.00 Persen	
3.28.01.1.03	Administrasi Umum				
3.28.01.1.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	11 Kab /Kota	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1.00 Tahun	
3.28.01.1.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11 Kab /Kota	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.00 tahun	
3.28.01.1.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Kab /Kota	Tersedianya Bahan-bahan Listrik	1.00 Tahun	
3.28.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 Kab /Kota	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	1.00 Tahun	
3.28.01.1.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	11 Kab /Kota	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1.00 tahun	
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 Kab /Kota	Pimpinan mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.00 tahun	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Mobil	11 Kab / Kota	Tersediannya Kendaraan Dinas	11 Unit	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Kab /Kota	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.00 tahun	
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Kab /Kota	Tersedianya Jasa Komunikasi	1.00 tahun	
3.28.01.1.03.07	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	11 Kab /Kota	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	1.00 Tahun	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Buru, Bursel, MBD, SBT, Malra, SBB, Kota Ambon	Terpeliharanya Gedung Kantor	7 Unit	
3.28.01.1.09.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11 Kab /Kota	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11 Kab /Kota	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi (UPTD KPH)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Tertib Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan		
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Buru dan SBB	Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Lokasi	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Berkurangnya tingkat kerusakan hutan		
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	11 Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Publik Akan Dampak Kerusakan Hutan	11 Lokasi	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11 Kab/Kota	Terselesaikannya pengaduan dan penyelesaian dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan secara litigasi dan non litigasi	11 Lokasi	

Ambon, April 2021
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku,



Ir. SADLI IE, M.Si, IPU
Pembina Utama Madya
NIP. 19680828 199403 1 010

TABEL T- C.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN
2023
DINAS KEHUTANAN PROVINSI
MALUKU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Tahun 2022			Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	URUSAN PILIHAN								
3.28	KEHUTANAN								
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		100.00 Persen	22,905,138,200.00			100.00 Persen	26,340,908,930.00
3.28.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				837,758,900.00				
3.28.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daeran Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/Anggaran	Ambon	1.00 Dokumen	837,758,900.00	APBD-DAU		1.00 Dokumen	963,422,735.00
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monev dan Penilaian Kinerja ASN UPTD KPH Dinas Kehutanan Prov. Maluku	Ambon	1.00 tahun	230,000,000.00	APBD-DAU		1.00 tahun	264,500,000.00
3.28.01.1.03	Administrasi Umum				17,419,081,150.00				
3.28.01.1.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ambon	1.00 Tahun	102,647,850.00	APBD-DAU		1.00 Tahun	118,045,027.50
3.28.01.1.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Ambon	1.00 tahun	53,795,850.00	APBD-DAU		1.00 tahun	61,865,227.50
3.28.01.1.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan-bahan Listrik	Ambon	1.00 Tahun	78,517,400.00	APBD-DAU		1.00 Tahun	90,295,010.00
3.28.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	Ambon	1.00 Tahun	21,805,150.00	APBD-DAU		1.00 Tahun	25,075,922.50
3.28.01.1.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Ambon	1.00 tahun	86,262,650.00	APBD-DAU		1.00 tahun	99,202,047.50
3.28.01.1.03.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pimpinan mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ambon	1.00 tahun	576,052,250.00	APBD-DAU		1.00 tahun	662,460,087.50
3.28.01.1.03.18	Operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Terlaksananya operasional UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Ambon	1.00 tahun	16,500,000,000.00	APBD-DAU-DBH		1.00 tahun	18,975,000,000.00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,276,520,450.00				
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Mobil	Tersediannya Kendaraan Dinas	Ambon	4 Unit	1,380,000,000.00	APBD-DAU		100.00 %	1,587,000,000.00
3.28.01.1.07.05	Pengadaan mebeleur	Tersediannya Mebeleur Kantor	Ambon	1 Paket	205,131,250.00	APBD-DAU		100.00 %	235,900,937.50
3.28.01.1.07.06	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Ambon	1 Paket	691,389,200.00	APBD-DAU		100.00 %	795,097,580.00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				999,187,750.00				
3.28.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Ambon	1.00 tahun	19,245,250.00	APBD-DAU		1.00 tahun	22,132,037.50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Tahun 2022					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi	Ambon	1.00 tahun	229,942,500.00	APBD-DAU		1.00 tahun	264,433,875.00
3.28.01.1.03.07	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Ambon	1.00 Tahun	750,000,000.00	APBD-DAU		1.00 Tahun	862,500,000.00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,142,589,950.00				
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Ambon	12 Bulan	450,000,000.00	APBD-DAU		100.00 %	517,500,000.00
3.28.01.1.09.01	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Ambon	12 Bulan	600,000,000.00	APBD-DAU		100.00 %	690,000,000.00
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Ambon	12 Bulan	92,589,950.00	APBD-DAU		100.00 %	106,478,442.50
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	68.00 Persen	43,177,739,150.00				49,654,400,022.50
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Tertib Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan			5,411,659,800.00				
3.28.03.1.03.04	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Data dan informasi keberadaan masyarakat adat	11 Kab/Kota	33 Lokasi	540,589,700.00	APBD-DAU		33 Lokasi	621,678,155.00
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terbina dan terkendalinya operasional IUPHHK dan penggunaan kawasan hutan	13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	2,052,304,950.00	APBD-DAU		13 Unit IUPHHK dan 11 Kab/Kota	2,360,150,692.50
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terlaksananya Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Operasional Lab. Inokulan Gaharu	11 Kab/kota	18.00 Lokasi	2,818,765,150.00	APBD-DAU		18.00 Lokasi	3,241,579,922.50
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Berkurangnya luas lahan kritis (Ha)			34,990,242,700.00				
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersedianya Dokumen RTnRL Provinsi Maluku	11 Kab/Kota	11 Lokasi	1,543,300,000.00	APBD-DBH		11 Lokasi	1,774,795,000.00
3.28.03.1.04.02	Pembangunan hutan rakyat di Luar Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun	3 Kab (Malteng, Buru dan Malra)	79 Ha	2,916,975,000.00	APBD-DBH		11 Lokasi	3,354,521,250.00
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Hutan Negara	Luas Areal Penghijauan / Reboisasi yang dibangun dan kegiatan "MURAD"	11 Kab/Kota	171 Ha	18,347,507,100.00	APBD-DBH		11 Lokasi	21,099,633,165.00
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Terkelolanya persemaian permanen dan kebun bibit	11 Kab/Kota	11 Unit	5,462,500,000.00	APBD-DBH		11 Lokasi	6,281,875,000.00
3.28.03.1.04.08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Brigade Dalkarhut dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	11 Kab/Kota	11 Lokasi	5,862,705,750.00	APBD-DBH		11 Lokasi	6,742,111,612.50
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terkendalinya rehabilitasi lahan kritis	11 Kab/Kota	11 Lokasi	857,254,850.00	APBD-DBH		11 Lokasi	985,843,077.50
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Berkurangnya tingkat kerusakan hutan	Page 2 of 4		2,327,604,600.00				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Tahun 2022					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Meningkatnya Pemahaman Publik Akan Dampak Kerusakan Hutan	11 Kab/Kota	11 Lokasi	287,500,000.00	APBD-DBH		1.00 Lokasi	330,625,000.00
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terselesaikannya pengaduan dan penyelesaian dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan secara litigasi dan non litigasi	Ambon	3 kegiatan	2,040,104,600.00	APBD-DBH		1.00 Lokasi	2,346,120,290.00
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				448,232,050.00				
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Tertib Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (Unit manajemen)	11 Kab/kota	86.00 Unit	448,232,050.00	APBD-DAU		86.00 Unit	515,466,857.50
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	68.00 Persen	1,752,571,250.00				2,015,456,937.50
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang dibentuk			1,752,571,250.00				
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Teridentifikasinya Kawasan Ekosistem Penting (KEE)	5 Kab/Kota	8 Lokasi	1,752,571,250.00	APBD-DBH		3.00 Lokasi	2,015,456,937.50
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	14.00 unit	14.00 unit	3,838,718,400.00			15 unit	4,414,526,160.00
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				3,838,718,400.00				
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Peningkatan Kelas KTH dan Pemberian Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif	11 Kab/Kota	14 Kelompok	2,159,566,600.00	APBD-DBH		14.00 Unit	2,483,501,590.00
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok PS yang terfasilitasi	11 Kab/Kota	14 Kelompok	1,679,151,800.00	APBD-DBH		14.00 Unit	1,931,024,570.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Tahun 2022					target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Kualitas Hutan melalui Tutupan lahan (%)	68.00 Persen	68.00 Persen	2,932,661,000.00				3,372,560,150.00
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2,932,661,000.00				
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi Dan Daya Dukung Wilayah DAS	Tersedianya Bangunan Konservasi Tanah dan Air	11 Kab/kota	11.00 Unit	2,932,661,000.00	APBD-DBH		11.00 Unit	3,372,560,150.00
Grand Total					74,606,828,000.0				85,797,852,200.0

DAU 6,905,138,200.00
DBH-DR 67,701,689,800.00

Ambon, April 2021
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku,



Ir. SADLI IE, M.Si, IPU
Pembina Utama
Madya
NIP. 19680828 199403 1 010